

# **Alam Pikir Populis Islam dan Merebaknya Histeria Massa: Potret Pergeseran Nilai Kebenaran dan Memudarnya Ideologi**

Fahmy Farid Purnama

Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat  
email: fahmyfaridpurnama@iaid.ac.id

Received: January 5, 2021 | Accepted: June 2, 2021

## **Abstract**

This study analyzes the phenomenon of populism, the nature of populist thought and its relation to mass hysteria. Global political events involving large numbers of masses have put the study of populism shifting from the periphery to the center of attention. In its various manifestations, populism represents a rejection of political elites which is based on the argument that populism is a response to a crisis of legitimacy for political institutions and actors. Based on descriptive and critical content analysis, this study aims to examine the trend of populism at the level of digital culture which is dominated by spectacle and market culture. By investigating how populist thinking works, this research seeks to understand the dynamics of populism and the logical consequences it entails, especially regarding the future of the actual heterogeneity of society, both in religious and cultural contexts, behind its tendency to totalize and homogenize everything through the logic equivalent in populism.

## **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis fenomena populisme, alam pikir populis dan kaitannya dengan budaya histeria massa. Pelbagai peristiwa politik global yang melibatkan sejumlah besar massa telah menempatkan studi populisme bergeser

dari pinggiran menjadi pusat perhatian. Dalam berbagai manifestasinya, populisme merepresentasikan penolakan terhadap elit politik yang dilandaskan pada argumen bahwa populisme merupakan respons terhadap krisis legitimasi atas institusi dan aktor politik. Dilandaskan pada analisis konten secara deskriptif dan kritis, penelitian ini bertujuan untuk mencermati tren populisme pada aras kebudayaan digital yang didominasi oleh budaya tontonan dan pasar. Dengan menyelidiki bagaimana alam pikir populis bekerja, penelitian ini berusaha memahami dinamika populisme beserta konsekuensi-konsekuensi logis yang diniscayakannya, khususnya terkait masa depan heterogenitas aktual masyarakat, baik dalam konteks agama maupun budaya, di balik kecenderungannya untuk mentotalisasi dan menghomogenisasi segala sesuatu melalui logika ekuivalen dalam populisme.

**Keywords:** Populism, democracy, mass hysteria, ideology, post-truth

## **Pendahuluan**

Rentetan peristiwa politik yang melibatkan mobilitas sejumlah massa dalam dua dasawarsa terakhir telah mendorong perbincangan intensif di kalangan sarjana maupun pegiat media. Di Indonesia, menggeliatnya fenomena tersebut tercermin mulai dari demonstrasi bertajuk “Aksi Bela Islam,” aksi tolak RUU KUHP, Revisi UU KPK, tolak RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*), hingga teraktual polemik di seputar gerakan oposisi di bawah komando Muhammad Rizieq Shihab *vis á vis* kekuasaan. Peristiwa serupa juga menggejala di berbagai belahan dunia lainnya; mulai dari peristiwa *Brexit*, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika di tahun 2017, hingga pemilihan umum di Polandia, Spanyol, serta Austria; dari referendum di Yunani, Swiss, dan Italia, hingga perubahan suasana politik radikal di Filipina. Gejala global tersebut sering kali dipicu oleh makin maraknya narasi-narasi yang dapat membangkitkan emosi dan histeria, bahkan memobilisasi massa,

baik menggunakan narasi ekonomi, budaya, ras, hingga narasi keagamaan. Serentetan peristiwa di atas, serta peristiwa-peristiwa global lainnya, menyingkap suatu fenomena sosial—diistilahkan oleh para sarjana dan awak media—bertajuk ‘populisme.’

Ketika memperhatikan bagaimana penggunaan istilah ‘populisme’ dalam pelbagai wacana lisan maupun tulisan, istilah tersebut secara deskriptif paling sering difungsikan dalam konteks kontestasi persaingan politik, khususnya sistem politik demokrasi yang menyediakan ruang terbuka bagi keterlibatan logika kesadaran massa. Meminjam asumsi Müller, populisme merupakan imajinasi politik yang dilandaskan pada klaim logika moral tertentu; yakni suatu cara pandang atas realitas politik yang memperhadapkan superioritas moral ‘rakyat’ melawan ‘elit penguasa’ yang dianggap korup atau inferior secara moral.<sup>1</sup>

Di Indonesia, narasi-narasi populis sangat lekat dengan wacana keagamaan, sektarianisme, sentimen rasial, politik identitas, hingga isu-isu primordialisme. Sementara di Eropa, sebagaimana dalam penelitian Hadiz, fenomena populisme terkait erat dengan kecenderungan anti-imigran yang direpresentasikan oleh politisi seperti *Le Pens* di Prancis, *Fortuyn* dan *Wilders* di Belanda, dan oleh *Far Right* yang belakangan ini kuat di negara-negara Nordik seperti Norwegia, Swedia dan Finlandia. Kemudian di Australia, *One Nation Party* pernah mewakili kecenderungan xenofobia serupa.<sup>2</sup>

Namun demikian, istilah populisme sendiri cenderung polisemistis dan ambigu, sehingga rentan terhadap banyak kesalahpahaman dan cenderung reduksionis. Upaya menemukan deskripsi paling memadai untuk mengilustrasikan keseluruhan fenomena politik global secara utuh dan tepat senantiasa terbentur dengan problem epistemologis, karena

---

<sup>1</sup> Jan-Werner Müller, *What is Populism?* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016), 19–20.

<sup>2</sup> Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (UK: Cambridge University Press, 2016), 21.

upaya-upaya merumuskan makna definitif yang ketat dan univokal bukanlah tugas yang mudah. Dikutip Skenderovic, Ionesco and Gellner memberikan ilustrasi kritis, bahwa ‘populisme hanyalah sebuah kata yang cenderung digunakan secara tidak tepat dalam konteks yang sepenuhnya heterogen.’<sup>3</sup> Serupa dengan kritik tersebut, peneliti yang lebih kontemporer, Mudde dan Kaltwasser, menegaskan bahwa, ‘populisme merupakan salah satu istilah yang paling banyak digunakan, sekaligus disalahgunakan di dalam dan di luar wilayah akademik.’<sup>4</sup> Oleh sebab alasan tersebut, tidak sedikit peneliti di bidang studi sosial dan politik cenderung skeptis terhadap keberadaan fenomena populisme itu sendiri. Beberapa bahkan menganggap populisme sebatas *epiphenomenon*; semacam fenomena sekunder yang terjadi bersamaan atau paralel dengan fenomena primer lain yang secara ontologis lebih fundamental. Hal tersebut diperrumit oleh penyalahgunaan istilah jurnalistik dengan cara serampangan dan cenderung kontradiktif.

Selain terbentur dengan problem definitif, populisme juga problematis dari sisi konseptual. Sebagai sebuah konsep, populisme memberikan ilustrasi teoretis yang samar dan ambivalen. Samar mengingat populisme cenderung tidak memiliki kerangka ideologis yang maksimalis dan rigid, seperti halnya liberalisme atau konservatisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang dapat diukur dan diartikulasikan secara memadai. Populisme memiliki banyak atribut ideologi, tetapi tidak bisa dikatakan sepenuhnya ideologis, sehingga sangat sulit untuk dirumuskan secara memadai. Sementara ambivalensi populisme mengacu pada wataknya—diistilahkan Taggart—seperti bunglon (*chamelomic character*), yakni seperti atribut tambahan yang dapat melekat pada ide di luar dirinya sendiri. Bagi Taggart, alasan di balik

---

<sup>3</sup> Damir Skenderovic, “Populism: A History of the Concept,” in *Political Populism* (Germany: Nomos Verlagsgesellschaft, 2017), 41.

<sup>4</sup> Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser, “Populism and (Liberal) Democracy: A Framework for Analysis,” in *Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy?* (New York: Cambridge University Press, 2012), 1.

watak adaptif nalar populis terletak pada raibnya komitmen pada nilai-nilai fundamental (*empty heart of populism*). Sementara ideologi lain mengandung, baik secara implisit maupun eksplisit, nilai-nilai fundamental seperti kesetaraan, kebebasan dan keadilan sosial, populisme justru tidak memiliki fundamen semacam itu.<sup>5</sup> Tak ayal, populisme sering kali menjadi semata-mata instrumen politis serta ideologis bagi kelompok progresif, reaksioner, demokrat, otokrat, gerakan kiri, maupun kanan.

Terlepas bagaimana populisme diperdebatkan, pertanyaannya, apakah populisme, pertama tama dan terutama, lebih bersifat strategis atautkah ideologis? Jika mengacu pada penegasan Pierre-André Taguieff, sebagaimana dipaparkan Skenderovic, pengartikulasian istilah populisme secara ketat hanya mungkin diterapkan secara terbatas pada wilayah tindakan dan wacana politik, bukan pada watak rezim politik maupun konten ideologi tertentu. Dalam pemaknaan semacam ini, populisme dapat dipahami sebagai metode, sarana diskursif, serta gaya retorika performatif yang berkaitan dengan persoalan komunikasi dan retorika politik.<sup>6</sup>

Di sisi lain, semakin banyak pula sarjana yang terlibat di dalam perbincangan populisme menggunakan pendekatan ideasional. Populisme tidak lagi dipahami semata-mata persoalan strategis serta bersifat instrumental dan performatif, namun pertama-tama justru berkaitan dengan persoalan watak diskursif dan ideologis yang melekat pada cara berfikir seorang populis. Dalam tilikkan Mudde, apa pun istilah teknis yang digunakan para sarjana, populisme senantiasa dipertautkan dengan dengan persoalan gagasan-gagasan, khususnya ide dasar tentang 'rakyat' dan 'elite.'<sup>7</sup> Dengan demikian, populisme bukanlah semata tentang cara bagaimana sebuah ide dimediasi dan diperkenalkan ke dalam wilayah politik strategis, melainkan juga tentang ideologi serta persepsi yang terkandung di balik sebuah ide populer. Karenanya, pada wilayah yang lebih

---

<sup>5</sup> Paul Taggart, *Populism* (Buckingham: Open University Press, 2000), 3–4.

<sup>6</sup> Skenderovic, "Populism: A History of the Concept," 50–51.

<sup>7</sup> Cas Mudde, "Populism: An Ideational Approach," in *The Oxford Handbook of Populism* (New York: Oxford University Press, 2017).

filosofis, populisme juga sangat mempengaruhi watak kebenaran semacam yang turut membentuk cara berpikir dan bertindak.

Persoalannya, meminjam analisis Bonikowski, tidak seperti kebanyakan ideologi, populisme didasarkan pada logika moral yang belum sempurna. Populisme sama sekali tidak menawarkan pandangan dunia secara utuh selayaknya ideologi, melainkan sebatas kritik sederhana terhadap konfigurasi kekuasaan yang ada.<sup>8</sup> Kecenderungan berpijak pada logika dan ideal moral tersebut telah menempatkan watak kebenaran menjadi sedemikian emotif dan sentimental; bahwa merasakan sesuatu lebih penting daripada sebuah fakta; bahwa sesuatu dianggap benar tergantung bagaimana seseorang mempresepsinya secara emosional. Dampaknya, watak kebenaran bergeser dari wilayah substansial menjadi semata performatif dan prosedural. Sehingga nalar populis dalam dirinya sendiri tidak dapat menawarkan jawaban yang kompleks maupun komprehensif atas realitas segala sesuatu.

Berpijak pada persoalan-persoalan seputar populisme di atas, penelitian ini berusaha menelisik fenomena populisme secara ideasional dalam perspektif analisis kontestasi wacana dan ideologi. Memang, memberi label terhadap gerakan-gerakan yang melibatkan mobilisasi sejumlah besar massa dengan istilah gerakan ‘populis’ seolah terasa memuaskan. Namun pelabelan itu sendiri tidak serta-merta menjawab pertanyaan: Pra-kondisi semacam apa yang mendorong makin menggeliatnya fenomena populisme? Logika semacam apa yang bekerja di balik narasi-narasi populis? Mengapa banyak orang turut terlibat dalam gerakan itu? Lanskap kontekstual semacam apa yang memungkinkan nalar populis bekerja?

Mempertimbangkan bahwa populisme merupakan konstruksi simbolik, maka hal terpenting bukanlah polemik di seputar pertanyaan apa yang dimaksud dengan populisme secara definitif—faktanya, banyak makna populisme yang dapat

---

<sup>8</sup> Bart Bonikowski, “Three Lessons of Contemporary Populism in Europe and the United States,” *Brown Journal of World Affairs* 23, no. 1 (2016): 9–24.

ditemukan di berbagai sumber akademis dan media populer, melainkan mengapa populisme menjadi istilah yang mengandung makna signifikan dan cenderung merepresentasikan watak berfikir dan bertindak di dalam keseharian kita akhir-akhir ini, khususnya berkembang melalui narasi-narasi keagamaan dan isu-isu rasial yang cukup intens berkontestasi di ruang-ruang publik.

Tanpa mengesampingkan pendekatan politik-strategis, penelitian ini memberikan proporsi lebih intens pada pendekatan ideasional dalam memotret populisme. Selain untuk mencermati secara kritis bagaimana nalar populis beroperasi secara performatif di dalam masyarakat, pendekatan ideasional juga dimaksudkan untuk menyediakan kerangka teoritis dan pedoman metodologis untuk mengukur, minimal, sejauh mana sesuatu berorientasi populer. Berbasiskan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analitis, penelitian ini akan terlebih dahulu menganalisis asal-usul problem teoretis di seputar populisme, kemudian secara kritis mengelaborasi konsekuensi-konsekuensi logis-filosofis, serta dampak praksis dari semakin menggejalanya nalar populis dalam membentuk cara berfikir dan bertindak masyarakat akhir-akhir ini, khususnya populisme yang menggunakan narasi-narasi keagamaan dan isu-isu rasial.

### **Memetakan Asal-Usul Populisme**

Mengadaptasi hauntologi-spektrofetik manifesto Marx, bahwa *hantu tengah bergentayangan langit-langit semesta ralitas politik global, hantu populisme*. Kontestasi politik yang melibatkan mobilisasi massa *vis á vis* elit penguasa menggejala hampir di seluruh dunia. Isu-isu yang memperhadapkan-hadapkan secara banal antara kekuasaan dengan oposisi tersebut merupakan fenomena global yang dipertautkan satu sama lain dalam sebuah frasa bertajuk ‘populisme.’

Secara leksikal, mengacu pada serangkaian hasil penelitian Skenderovic terhadap pelbagai literatur, bahwa sampai tahun 1990-an, populisme belum didiskusikan secara serius pada level teoretis-konseptual. Secara eksklusif,

populisme difungsikan sebatas istilah bagi segala bentuk fenomena sejarah khas yang kongkrit dan aktual. Gerakan agraria *People's Party* di Amerika dan gerakan sosial *Narodniki* di Russia yang meskipun muncul dalam konteks yang sangat berbeda, telah lama dianggap sebagai perlambang simbolis dari kemunculan geliat populisme. Di Prancis, istilah populisme merujuk pada tren sastra yang berkembang di kalangan sastrawan Léon Lemonnier dan André Thérive. Keduanya menjadi simbol kritik terhadap watak eksklusif dan elitis sastra borjuis pada masa itu.<sup>9</sup>

Untuk menjernihkan asal-usul istilah populisme, beberapa penelitian, sebagaimana hasil penelusuran Hawkins dan Kaltwasser melalui beberapa literatur, melacaknya hingga tahun 1960-an. Sayangnya, catatan-catatan yang ditemukan tidak banyak membantu menjelaskan kebangkitan kembali populisme selama beberapa dekade berikutnya. Para sarjana juga berusaha mencari penjelasan memadai melalui konteks sejarah dan ekonomi yang sangat spesifik, seperti kebijakan industrialisasi yang menggantikan impor dan tantangan modernisasi tahap akhir. Hanya saja, ketika kekuatan populis muncul kembali dalam versi neo-liberal di Amerika Latin pada tahun 1990-an, menjadi jelas bahwa populisme tidak dapat dibatasi pada seperangkat kebijakan ekonomi tertentu.<sup>10</sup> Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa gerakan populis muncul dalam varian yang sangat beragam, sehingga akan sulit untuk menentukan, apakah fenomena populisme global tersebut memiliki latar kausalitas yang sama. Namun yang jelas, akumulasi dari fenomena-fenomena tersebut memberikan fungsi analitik dan heuristik terhadap istilah populisme yang dipengaruhi oleh perubahan pengalaman politik kontemporer dan dorongan jurnalistik yang sangat ketat. Pada titik ini, populisme tidak lagi diperbincangkan oleh para sarjana secara deskriptif, melainkan juga analitis-interpretatif.

---

<sup>9</sup> Skenderovic, "Populism: A History of the Concept," 41–43.

<sup>10</sup> Kirk A. Hawkins dan Cristóbal Rovira Kaltwasser, "Introduction: The Ideational Approach," in *The Ideational Approach to Populism. Concept, Theory, and Analysis*, 2019, 2.



Para sarjana sendiri merespon lonjakan fenomena populisme global dengan pelbagai kekhawatiran dan harapan. Bagi sebagian sarjana, fenomena populisme merupakan ancaman terbesar bagi kelangsungan demokrasi, bahkan berpotensi memporak-porandakan semangat modernitas yang berbasiskan kedaulatan otoritas akal budi subjek. Namun bagi sebagian lainnya, populisme merepresentasikan respon demokratis terhadap kesewenang-wenangan para elit teknokrat yang telah merampas kehendak mayoritas.

Untuk menangkap esensi dari populisme, ilustrasi Taggart menarik untuk dicermati, bahwa upaya-upaya para sarjana untuk menjaring esensi populisme telah bermunculan di waktu dan tempat yang berbeda, akan tetapi sangat sulit untuk melihat pola-pola epistemik yang konsisten. Pada satu situasi, populisme membawa semangat perubahan, namun pada situasi berbeda justru menjadi kekuatan untuk melawan perubahan; di satu konteks yang khas membawa nafas kiri progresif, namun pada konteks lainnya justru menjadi alat untuk mempertahankan *status quo* dan instrumen politik bagi gerakan ekstrim kanan.<sup>11</sup> Hal ini tersebut menjelaskan, mengapa gerakan populis sering menjadi fenomena sentimentil dan episodik.

Menanggapi anomali tersebut, kemudian didorong oleh semakin masifnya kekuatan populis baru-baru ini, para sarjana mulai mempelajari populisme dalam orientasi yang sangat berbeda. Perdebatan para sarjana di seputar populisme telah melahirkan banyak perspektif. Beberapa sarjana, semisal Kurt Weyland,<sup>12</sup> menekankan penelitiannya pada aspek

---

<sup>11</sup> Taggart, *Populism*, 10.

<sup>12</sup> Dalam kajian Weyland, jika elemen konstitutif populisme merujuk pada peran aktual “rakyat,” kemudian menangkap hubungan khusus antara pemimpin dan pengikut massa, maka gagasan ini paling baik dikonseptualisasikan sebagai strategi politik. Dengan kata lain, pemilihan strategi politik yang tepat dan melibatkan mobilisasi massa akan sangat menentukan cara dan sarana yang digunakan aktor politik, khususnya aktor politik dapat menopang kekuasaan dan memastikan dukungan dan kepatuhan warga negara. Kurt Weyland, “A Political-Strategic Approach,” in *The Oxford Handbook on Populism* (New York: Oxford University Press, 2017).

organisasional yang ditopang oleh ketokohan karismatik dan kemampuan memobilisasi massa; sarjana lainnya, seperti Ernesto Laclau<sup>13</sup> atau Chantal Mouffe<sup>14</sup> berpusat pada aspek dialektika ekonomi-politik, atau elemen diskursif seperti moral dan bahasa *Manichean* yang mempertentangkan ‘rakyat’ melawan ‘elite;’ perspektif berbeda, sebagaimana pendekatan kultural Pierre Ostiguy,<sup>15</sup> lebih melihat populisme sebagai retorika performatif yang berkaitan dengan persoalan komunikasi politik; sementara sarjana yang memusatkan perhatiannya pada persoalan ide, semisal Cas Mudde,<sup>16</sup> menilikinya dalam perspektif yang lebih kental dengan upaya pelacakan ide-ide yang beroperasi di balik alam pikir populisme.

Meskipun pertarungan pada level konseptual masih jauh dari kata usai, namun semakin banyak sarjana yang menaruh perhatian serius pada fenomena yang melibatkan mobilisasi masa. Boleh jadi dalam paradigma politik ke depan, populisme bagi sebagian sarjana, semisalan Anselmi, bukan lagi sebatas hipotesis dalam kontestasi politik demokrasi; bukan lagi deviasi, anomali, degenerasi atau patologi demokrasi, seperti yang sering dipahami sebelumnya. Bagi Anselmi, populisme saat ini,

---

<sup>13</sup> Ernesto Laclau, *On Populist Reason* (London: Verso, 2005).

<sup>14</sup> Chantal Mouffe, *For a Left Populism* (London: Verso, 2018).

<sup>15</sup> Menurut Ostiguy, Populisme dicirikan oleh bentuk hubungan politik tertentu antara pemimpin politik dan basis sosial. Relasi tersebut dibasiskan dan diartikulasikan seruan-seruan retorika performatif remeh-temeh (*low*) yang beresonansi dan mendapatkan penerimaan positif di ruang publik pada segmen sosial tertentu karena alasan sejarah sosial-budaya. Atas alasan inilah, Ostiguy mendefinisikan populisme sebagai “memamerkan hal yang remeh” (*flaunting of the “low”*). Bagi Ostiguy, pendekatan kultural tidak berarti mereduksi fenomena populisme menjadi sebatas manipulasi atau demagogi yang cenderung melihat sentralitas kepemimpinan yang beroperasi melalui komunikasi *top-down* (instruksionis) secara eksklusif, melainkan fenomena dua arah yang secara terpusat ditentukan oleh klaim-klaim retorik yang diartikulasikan dan relasi-relasi yang dibangun antara pemimpin dan partisan melalui komponen-komponen sosio-budaya dan politik-budaya. Pierre Ostiguy, “Populism: A Socio-Cultural Approach Pierre,” in *The Oxford Handbook of Populism* (New York: Oxford University Press, 2017).

<sup>16</sup> Mudde, “Populism: An Ideational Approach.”

terlepas dari keragaman maksud dan tujuan politisnya, merupakan variable demokrasi yang sangat mungkin, tidak hanya terkait dengan gerakan sosial, tetapi juga entitas pelbagai gerakan yang terlembagakan dalam lingkaran kekuasaan.<sup>17</sup>

### **Populisme: Strategis atautkah Ideologis?**

Selama dua dekade terakhir, pendekatan ideasional telah muncul sebagai salah satu pendekatan lintas regional dan interdisipliner paling populer untuk meneliti fenomena populisme. Dipaparkan Hawkins, sebagaimana tercermin dalam pengistilahannya, orientasi pendekatan ideasional terletak pada upaya menganalisis penyebab dan konsekuensi populisme dalam kaitannya dengan gagasan-gagasan populis—yakni keyakinan bahwa realitas politik mencerminkan perjuangan *Manichean* antara niat baik ‘rakyat jelata’ dan konspirasi ‘elit penguasa.’<sup>18</sup>

Terdapat sekurangnya dua arus utama yang berkembang di antara para sarjana yang meneliti populisme sebagai sekumpulan gagasan menggunakan pendekatan ideasional: populisme sebagai diskursus dan ideologi. Sebagai sebuah diskursus, kajian tentang populisme banyak dikembangkan Ernesto Laclau dan beberapa sarjana di lingkarannya yang berusaha merumuskan kerangka normatif-teoretis bagi populisme. Merujuk pada analisis Hawkins dan Kaltwasser, perspektif ini didasarkan pada kritik mendasar terhadap reduksionisme ekonomi yang melekat pada Marxisme, sekaligus keinginannya untuk mengembangkan mazhab politik pasca-strukturalis yang menganggap bahwa identitas politik terbentuk melalui praktik-praktik diskursif.<sup>19</sup> Tak ayal, melalui tilikan post-Marxisme, Laclau cenderung melihat populisme sebagai upaya-upaya strategis untuk membangkitkan tatanan hegemonik baru yang memperhadap-hadapkan secara dialektis

---

<sup>17</sup> Manuel Anselmi, *Populism: An Introduction* (New York: Routledge, 2018), 1.

<sup>18</sup> Kirk A. Hawkins, “The Ideational Approach,” in *Routledge Handbook of Global Populism* (New York: Routledge, 2019).

<sup>19</sup> Hawkins dan Kaltwasser, “Introduction: The Ideational Approach,” 4.

antara ‘rakyat’ melawan ‘elite.’<sup>20</sup> Sementara dalam bentuknya yang lebih positivistik, populisme sebagai diskursus lebih dimaknai sebagai seni retorika politik dalam bingkai konflik *Manichean*.<sup>21</sup>

Berbeda dengan diskursus, dalam perspektif Canovan,<sup>22</sup> kemudian dikembangkan secara lebih definitif oleh Mudde,<sup>23</sup> populisme memiliki banyak atribut yang memungkinkannya dikatakan sebagai ideologi. Hanya saja, jika ideologi dimaknai sebagai sekumpulan gagasan normatif yang terkait dengan cara pandang terhadap dunia, populisme tidak bisa dikatakan sepenuhnya ideologis. Alasan inilah yang mendorong para sarjana, semisal Mudde, mengidentifikasinya sebagai *thin-centered ideology*; semacam watak ideologi yang ‘tidak padat,’ ‘tipis,’ atau ‘minimalis.’ Jika ideologi maksimalis (*thick-centered ideology*) adalah sekumpulan gagasan normatif yang terkait dengan cara pandangan terhadap dunia dan bagaimana dunia seharusnya, maka *thin-centered ideology* memiliki struktur morfologis lebih terbatas, sehingga hanya mungkin mengandung dan memberikan suatu makna sejauh terikat dengan—terkadang berafiliasi dengan—ideologi lain.<sup>24</sup>

*Thin-centered ideology* sendiri merupakan sebuah istilah yang—sebagaimana dalam penelitian Hawkins dan Kaltwasser—digunakan pertama kali oleh Michael Freeden<sup>25</sup> untuk menanalisis watak ideologi-ideologi yang berporos pada sejumlah konsep inti yang sangat terbatas.<sup>26</sup> Sementara menurut

---

<sup>20</sup> Laclau, *On Populist Reason*.

<sup>21</sup> Benjamin Moffitt dan Simon Tormey, “Rethinking populism: Politics, Mediatisation and Political Style,” *Political Studies* (2014).

<sup>22</sup> Margaret Canovan, “Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy,” in *Democracies and the Populist Challenge* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002).

<sup>23</sup> Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist,” *Government and Opposition* 39, no. 4 (2004).

<sup>24</sup> Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2017), 6.

<sup>25</sup> Michael Freeden, *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach* (Oxford: Oxford University Press, 1996).

<sup>26</sup> Hawkins dan Kaltwasser, “Introduction: The Ideational Approach,” 5.

Ben Stanley, maksud istilah *thin-centered* mengacu pada watak populisme yang tidak memiliki kapasitas memadai untuk mengajukan perspektif yang luas dan koheren atas persoalan-persoalan politik mendasar. Sehingga, sebagai ideologi ‘politik minimalis,’ populisme tidak dapat berdiri sendiri.<sup>27</sup> Watak minimalis ideologi populisme tersebut meniscayakan hadirnya fragmen-fragmen ideologis lain sebagai katalisatornya. Karena secara implisit atau eksplisit, populisme tidak memiliki watak fundamental selayaknya ideologi: yaitu koherensi.<sup>28</sup>

Untuk memahami singularitas ide, penting juga merujuk watak ideologi lain yang kontras dengan populisme; yakni dalam hal ini adalah elitisme dan pluralisme. Meminjam penelitian Hawkins dan Kaltwasser terhadap karya Giovanni Sartori,<sup>29</sup> secara sederhana, elitisme dapat dianggap sebagai wacana yang memperhadap-hadapkan moralitas ‘rakyat’ dengan ‘elit;’ bahwa yang pertama diandaikan sebagai segerombol massa yang berbahaya dan irrasional, sementara yang terakhir sebagai sekelompok kecil orang terpilih yang digambarkan memiliki kualitas intrinsik dengan tingkat kecerdasan tinggi, keterampilan khusus, serta memiliki keluhuran moral, sehingga karenanya berhak atas pengaruh dan otoritas kekuasaan. Di sisi lain, pluralisme memandang masyarakat sebagai sekumpulan individu dan kelompok yang kompleks dengan opini yang berbeda. Tak ayal, seorang pluralis cenderung memandang skeptis klaim kehendak ‘rakyat’ sekaligus menolak superioritas ‘elit.’<sup>30</sup>

Lain pada itu, salah satu cara terbaik untuk mendapatkan ilustrasi awal suatu fenomena yang masih diperdebatkan adalah memulainya dari suatu pengertian sederhana yang dapat membantu kita mengidentifikasi karakter utama fenomena

---

<sup>27</sup> Ben Stanley, “The Thin Ideology of Populism,” *Journal of Political Ideologies* 13, no. 1 (2008).

<sup>28</sup> Paris Aslanidis, “Is Populism an Ideology? A Refutation and a New Perspective,” *Political Studies* 64, no. 1 (2015).

<sup>29</sup> Giovanni Sartori, “Concept Misformation in Comparative Politics (4),” *American Political Science Review* 64, no. 4 (1970): 1033–1053.

<sup>30</sup> Hawkins dan Kaltwasser, “Introduction: The Ideational Approach,” 4.

tersebut, berikut logika yang bekerja dibalik ide-ide populis. Dalam hal ini, Mudde mendefinisikan populisme sebagai ideologi yang menganggap bahwa masyarakat pada prinsipnya dipisahkan menjadi dua kelompok homogen dan antagonis, 'rakyat murni' *vis á vis* 'elit korup;' bahwa politik harus menjadi ekspresi dari *volonté générale* (kehendak umum) rakyat.<sup>31</sup>

Sementara itu, bagi Laclau, melalui analisis logika kategoris, populisme pertama-tama harus dipahami bukan sebagai kategori ontis atau totalitas objek-objek deskriptif (*present-at-hand*), melainkan problem kategori ontologis yang tidak mungkin diterjemahkan ke dalam narasi konseptual dan definitif apapun. Karenanya, Laclau cenderung menghindari klaim artikulasi definitif dan universal atas populisme, melainkan dipahami melalui kategori formal untuk mengidentifikasi logika yang beroperasi di balik populisme; yakni logika ekuivalen yang bekerja dengan cara mentotalisasi dan menghomogenisasi segala sesuatu, kemudian mereduksi sejumlah heterogenitas aktual.<sup>32</sup> Kecenderungan untuk mentotalisasi heterogenitas sosial menjadikan logika ekuivalen dalam populisme hanya bekerja di level permukaan wacana yang merupakan konsekuensi logis dari tuntutan sosial yang niscaya berbeda satu sama lainnya.

Terlepas dari perdebatan di atas, paradigma yang dijadikan landasarn teoretis-konseptual keduanya cenderung identik; bahwa populisme dipahami sebagai jenis ide yang berbeda dari watak ideologi klasik. Keduanya juga mencermati bahwa nalar populis dapat ditemukan di semua sisi spektrum politik, khususnya sistem politik elektoral. Karena itu, sebagai sebuah ide, populisme memberikan keuntungan sekaligus tantangan tersendiri bagi para sarjana, khususnya tentang bagaimana menulis tentang fenomena yang masih dalam tahap perkembangan serta cenderung sentimental dan episodik.

---

<sup>31</sup> Mudde, "The Populist Zeitgeist," 543.

<sup>32</sup> Ernesto Laclau, "Populism: What's in a Name," in *Populism and the Mirror of Democracy* (London: Verso, 2005), 44.

### **Rakyat *vis á vis* Elit sebagai *Proxy* Populisme**

Latar politik yang melekat dalam penggunaan istilah populisme menunjukkan bahwa, sebagaimana analisis Colliot-Thélène, sejauh istilah *populus* dalam konteks populisme terkait erat dengan istilah *démos* dalam konteks demokrasi, analisis populisme selalu melibatkan konsepsi politik demokrasi.<sup>33</sup> Sementara dalam kaitannya dengan politik Islam kontemporer, sebagaimana diuraikan Hadiz, *ummah* menjadi *proxy* populisme Islam.<sup>34</sup> Dengan demikian, jika pendekatan ideasional, baik sebagai diskursus ataupun ideologi, meletakkan ‘rakyat’ (*populus/ummah*) sebagai poros analisis, maka elemen inti dari repertoar populis terletak pada klaim untuk berbicara dan bertindak atas nama ‘rakyat.’ Hanya saja, mempertimbangkan klaim tersebut juga merupakan elemen konstitutif dari demokrasi, beberapa sarjana menambahkan elemen lain dalam populime; yakni klaim untuk berbicara dan bertindak dengan mengatasnamakan ‘rakyat’ melawan ‘elit.’

Ciri khas populisme sendiri terletak pada komitmen, atau bahkan sebatas klaimnya pada ‘rakyat,’ terutama sejauh nilai-nilai yang dinarasikan kontras dengan nilai-nilai ‘elit.’ Mengacu pada analisa Taggart, dari posisi inilah populisme menemukan makna anti-elitismenya.<sup>35</sup> Pertanyaannya, apa/siapa yang terkategori sebagai ‘rakyat’ yang dikontraskan secara antagonistik dengan ‘elit?’ Mengapa ‘rakyat’ tampaknya menjadi elemen terpenting dalam populisme? Narasi semacam apa yang membuat sesuatu menjadi populer di mata “rakyat,” kemudian menemukan konteksnya dalam sistem politik demokrasi?

---

<sup>33</sup> Cathérine Colliot-Thélène, “Populism as a Conceptual Problem,” in *Populism and the Crisis of Democracy: Concepts and Theory*, 2018, 18.

<sup>34</sup> Diuraikan Hadiz, secara tradisional, istilah *ummah* cenderung dipahami secara supranasional; yakni suatu makna yang tidak tersegmentasi oleh batas politis maupun geografis. Namun seiring perkembangan gerakan Islam melalui perjuangan konkret melawan kekuatan otoriter nasional, istilah *ummah* mengalami penyempitan makna menjadi tersegmentasi pada komunitas-komunitas beriman juga wilayah-wilayah masyarakat tertentu. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, 4-5.

<sup>35</sup> Taggart, *Populism*, 91.

Memang, komitmen/klaim politik populis kepada ‘rakyat’ tidak lantas menjadinya sebatas retorika kosong belaka; bahwa istilah tersebut merujuk pada suatu fakta sosial. Hanya saja, konsepsi ‘rakyat’ itu sendiri sangatlah rumit, bahkan pada sebagian situasi—ketika gerakan populis memanifestasikan dirinya—berasal dari komitmennya untuk ide lain. Penyebabnya, pemaknaan istilah ‘rakyat’ bukanlah mengacu pada suatu objek aktual dan univokal, melainkan bersifat kontekstual, sehingga cenderung fleksibel dan ambigu—boleh jadi pada konteks tertentu sebatas penanda kosong (*empty signifier*). Ambiguitas istilah ‘rakyat’ tersebut merujuk pada, meminjam uraian Brubaker, tiga makna utama yang terkandung di dalamnya; yakni sebagai ‘rakyat biasa’ (*common or ordinary people*); sebagai ‘rakyat jelata’ (*plebs*) dari kelompok kelas pekerja yang dikenal dalam struktur kelas masyarakat Romawi Kuno yang berusaha untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan; serta sebagai ‘rakyat berdaulat’ (*démos*) dalam struktur politik demokrasi. Dalam pengungkapan lain, istilah ‘rakyat’ bisa dimaknai secara moral, kultural, serta politik.<sup>36</sup>

Sebagai kategori praktis, ambiguitas istilah ‘rakyat’ terletak pada kemungkinannya untuk diartikulasikan dalam tiga kategori utama; *ordinary people*, *plebs* dan *démos*. Akan tetapi sebagai kategori analisis, populisme meniscayakan suatu pembatasan lain yang lebih ketat. Mengingat penggunaan istilah populisme dalam pelbagai wacana lisan maupun tulisan paling sering difungsikan untuk menganalisis fenomena politik global, maka istilah *populus* cenderung dipertautkan dengan sistem politik demokrasi, dalam suatu hubungan yang ambivalen. Bahkan oleh sebab ambivalensi tersebut, meminjam analisis Skenderovic, banyak sarjana kemudian melihat fenomena populisme bisa saja menjadi ancaman juga koreksi atas sistem politik demokrasi.<sup>37</sup> Sementara dalam analisis Taguieff, sebagaimana dikutip Mény dan Surel, populisme, dalam ambiguitas konstitutifnya, dapat dianggap sebagai

---

<sup>36</sup> Rogers Brubaker, “Populism and Nationalism,” *Nations and Nationalism* 26, no. 1 (2020): 49.

<sup>37</sup> Skenderovic, “Populism: A History of the Concept,” 42.



penyelewengan ideologis dari sistem politik demokrasi; semacam patologi politik demokrasi.<sup>38</sup>

Dari sudut pandang di atas, tampak jelas bahwa di satu sisi populisme secara positif dapat dicermati sebagai fenomena demokratisasi dan langkah-langkah progresif yang memiliki efek kritis dan reformis pada sistem ekonomi-politik demokrasi. Di sisi lain, populisme secara negatif dapat dilihat sebagai patologi demokrasi yang menolak terhadap heterogenitas sosial, bahkan boleh jadi menggeret pada bentuk totalitarian gaya baru. Namun demikian, fleksibilitas dan ambiguitas istilah ‘rakyat’ tersebutlah yang memungkinkan aktor populis untuk mengklaim narasi-narasinya sebagai representasi dari kehendak ‘rakyat.’ Selain watak partisannya, klaim atas nama ‘rakyat’ menjadi objek populis juga karena bersentuhan langsung dengan persoalan identitas (siapa dan bukan siapa mereka), persoalan kualitas (bagaimana mereka) dan persoalan kuantitas (berapa banyak mereka).

Populisme sendiri membutuhkan fleksibilitas makna ‘rakyat’ sebagai *proxy*-nya, sehingga dapat disesuaikan dengan narasi populis apapun. Hanya saja, klaim seseorang yang mengatasnamakan representator ‘rakyat’ tidak lantas secara otomatis serta-merta dapat diterjemahkan ke dalam tindakan populis. Selain membutuhkan ketokohan (*idol*) karismatik dalam menyebarkan ide-ide populer, mengaktivasi populisme juga membutuhkan konteks dan interpretasi yang tepat sebagai katalisatornya, sehingga narasi-narasi populis dapat dianggap ‘masuk akal’ bagi setiap individu sosial yang dapat menciptakan kohesi di dalamnya, kemudian menggerakkan emosi, histeria, bahkan mobilisasi massa.

Pada level individu, populisme merupakan tuntutan laten yang harus diaktifkan melalui konteks yang sesuai dengan kode linguistik dan emosional masyarakat, serta pembingkaihan (*framing*) yang tepat, sehingga dapat mengendapkan/ menyamakan heterogenitas sosial aktual, kemudian larut

---

<sup>38</sup> Yves Mény dan Yves Surel, “The Constitutive Ambiguity of Populism,” in *Democracies and the Populist Challenge* (London: Palgrave Macmillan, 2002), 3.

dalam alam pikir masyarakat kebanyakan. Dalam analisis Hawkins dan Kaltwasser, untuk mengaktivasi sikap-sikap populis, diperlukan konteks sosial yang membuat pesan populis masuk akal; yakni dengan memberikan narasi gaya *Manichean*, bahwa ‘elit’ telah dan sedang bersekongkol melawan ‘rakyat,’ secara sadar bertindak dengan cara yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat. Kelompok ‘elit’ dinarasikan sebagai aktor yang telah gagal dalam merepresentasikan *volonté générale* dalam sistem demokrasi.<sup>39</sup> Konteks politik tersebut menciptakan perasaan marah dan kesal, kemudian mendorong respons populis dari masyarakat.

Lebih lanjut, Hawkins dan Kaltwasser menjelaskan bahwa, konteks tersebut tidak secara otomatis ditafsirkan dengan cara populis. Respon populis dari masyarakat membutuhkan elemen lain yang dapat membingkai persoalan kegagalan ‘elit’ tersebut lebih dari sekadar kegagalan penguasa yang hanya membutuhkan perubahan-perubahan kecil. Dalam hal ini, terdapat sekurangnya tiga mekanisme kognitif yang terlibat dalam proses pembingkai; yakni retorika populis untuk menyalahkan dan mendelegitimasi kekuasaan yang dapat menciptakan krisis kepercayaan terhadap penguasa, dikotomisasi identitas kelompok yang sangat spesifik untuk menentukan mana yang menjadi bagian dari barisan kelompok (subjek demokratis yang dibentuk oleh semacam mayoritas warga negara biasa), siapa yang di luar barisan (elit penguasa yang menjadi oposisi dari kehendak rakyat), serta isu-isu yang dapat membangkitkan emosi massa,<sup>40</sup> seperti ketakutan dan kemarahan melalui pembingkai isu-isu keagamaan, sektarianisme, sentimen rasial, politik identitas, xenofobia, hingga isu-isu primordialisme.

Mengingat bahwa landasan dikotomi normatif *Manichean* antara ‘rakyat’ *vis á vis* ‘elit’ lebih bersifat moralistik daripada programatik, maka penting bagi aktor populis untuk mengatasi sejumlah heterogenitas aktual dalam masyarakat; yakni

---

<sup>39</sup> Hawkins dan Kaltwasser, “Introduction: The Ideational Approach,” 8.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 9.

melakukan homogenisasi, bahkan mentotalisasi nalar publik, kemudian mereduksi sejumlah heterogenitas aktualnya. Hanya saja harus dipahami, meskipun nalar populis dituntut untuk mengoperasikan logika ekuivalen, namun sebaliknya perbedaan tuntutan sosial aktual justru menuntut cara memahami menggunakan logika diferensial. Maka untuk mengatasi hal tersebut, logika ekivalen hanya dapat beroperasi di level permukaan. Dalam pengertian bahwa logika ekuivalen tidak membutuhkan detail atau rasionalisasi sebuah narasi populis, melainkan hanya isu permukaan yang mampu membangkitkan emosi massa semata yang cenderung terpantik manakala menyentuh aspek pedalaman psikis paling emosional dan sentimental. Tak ayal, populisme cenderung mengedepankan yang simbolis dari pada yang esensial, yang hiperbolis daripada yang faktual.

### **Konsekuensi Filosofis Populisme dan Tantangannya: Menggeliatnya Narasi *Post-Truth***

Kebenaran, baik sebagai konsep atau properti logika, adalah konsep dasar dan nilai *par excellence* pada setiap penyelidikan filosofis. Sebagai konsep dasar penyelidikan filosofis, kebenaran terkait erat dengan begitu banyak variabel wacana fisafat lain. Terkadang, kebenaran terkait dengan persoalan keyakinan, pengetahuan, bahasa, dan konsep logika, bahkan yang terpenting kebenaran terkait dengan konsep misterius lain: realitas. Kadang, mungkin lebih sering, kegagalan untuk menemukan kebenaran cenderung mendorong seseorang menghadirkannya dalam bentuk penyederhanaan, generalisasi, metafora, hingga mitos dan fiksi. Untuk menghindari labirin kebenaran, para filsuf sering kali mencoba menganalisa hubungan kebenaran dengan fakta atau realitas. Pertanyaannya, bagaimana watak kebenaran dalam konteks populisme, khususnya di kancah kebudayaan kontemporer?

### ***Lanskap Masyarakat Kontemporer***

Situasi masyarakat kontemporer ditandai oleh semakin massifnya migrasi keseharian manusia ke dalam dunia digital

yang turut mengubah pola interaksi antar manusia secara radikal; interaksi yang pada mulanya berkembang dalam tradisi oral (*oral culture*), kemudian tulis (*writing culture*), serta-merta berubah menjadi berbasiskan gambar algoritmik (*image/digital culture*). Tak ayal, persoalan gambar beserta citra, pencitraan dan interpretasi yang menubuh di dalamnya menjadi sangat sentral. Gambar tidak lagi dimaknai semata-mata representasi dari realitas, melainkan bisa menjadi sedemikian politis, bahkan ideologis. Mengapa gambar menjadi sedemikian setral dalam membicarakan kebudayaan masyarakat kontemporer?

Diilustrasikan Heidegger, isu utama yang mencirikan realitas modern (post-modern), bahwa *peristiwa penting yang menandai zaman modern adalah penaklukkan dunia sebagai gambar (Bild)*.<sup>41</sup> Sebagai seorang filsuf yang bergumul dengan wacana ontologi dengan berporos pada persoalan *Dasein (being-in-there)*, ungkapan Heidegger menegaskan suatu perubahan radikal di tingkat realitas, bahkan meradikalisasi persoalan di seputar metafisika (ontologi). Meminjam interpretasi Lèvin dalam *The Opening Vision*, frase Heidegger tersebut mengandaikan suatu pelampauan realitas aktual yang diistilahkan dengan ‘ontologi gambar’ (*ontology of picture/ontology of image*). Terjadi peralihan lanskap kebudayaan manusia yang sedemikian radika; dari budaya oral, kemudian budaya tulis, bergeser menjadi budaya gambar, dengan kekhasan dan problemnya masing-masing. Gambar menjadi sedemikian identik dengan esensi metafisika (ontologi) modern yang turut mempengaruhi bagaimana suatu kebenaran dipresepsi, diinterpretasi, hingga diejawantahkan ke dalam tindakan.

Dalam aras kebudayaan lisan dan tulisan, bahasa verbal menjadi instrumen fundamental bagi penutur realitas. Namun ketika representasi realitas beralih menuju budaya digital, gambar—terutama citra algoritmik yang dapat diprogram, dibingkai, bahkan dimanipulasi sedemikian rupa melalui proses editing, menjadi instrumen vitalnya. Maka, tidaklah berlebihan

---

<sup>41</sup> Martin Heidegger, “The Age of the World Picture,” in *The Question Concerning Technology*, ed. William Lovitt (New York: Garland Publishing, 1977), 174.

untuk mengatakan bahwa situasi kebudayaan kontemporer saat ini dapat dibayangkan sebagai budaya imajinal; sebuah dunia yang dicirikan oleh kecenderungan total untuk melihat realitas segala sesuatu dalam bentuk gambar. Tentunya, maksud gambar (*Bild*) dalam wacana Heidegger tersebut bukan berarti gambaran dunia, tetapi dunia yang dibayangkan, dipahami, diyakini, bahkan dibingkai sebagai gambar; yakni realitas dalam representasi gambar, yang kemudian serta-merta dianggap sebagai realitas itu sendiri. Dunia imajinal direduksi sedemikian rupa menjadi realitas yang dikendalikan dan dijajah oleh citra suatu gambar.

Realitas gambar sendiri mengandung paradoks yang inheren dalam dirinya. Berpijak pada analisa Lechte, gambar adalah salah satu entitas yang membingungkan—bahkan mungkin lebih membingungkan daripada sistem bahasa manusia. Gambar selalu lebih kompleks dari sekadar representasi, lebih luas dari pada analogi, lebih rumit dari sekedar keseuaian antara gambar dan objek representasinya.<sup>42</sup> Dijelaskan Vernant saat menguraikan teori *mimēsis* Plato, bahwa gambar merupakan ekspresi dari berbagai bentuk representasi realitas yang dapat dicerap panca indera. Namun demikian, gambar bukanlah realitas dalam dirinya sendiri, sehingga di dalamnya terkandung watak inkonsistensi, kontradiksi dan relativitasnya.<sup>43</sup> Dalam ungkapan lain, gambar menempatkan realitas dalam suatu situasi paradoksal; bahwa ia merujuk pada suatu objek fenomenal, namun pada saat yang sama bukanlah objek itu sendiri. Dalam gambar, terjadi tarik-ulur antara metafisika kehadiran (*presence*) dan ketidakhadiran (*absence*); berada di sini (*being-here*) sekaligus di tempat lain (*being-elsewhere*); materialitas gambar dalam immaterialitas objeknya. Permainan

---

<sup>42</sup> John Lechte, *Genealogy and Ontology of the Western Image and Its Digital Future* (New York: Routledge, 2012), 6.

<sup>43</sup> Jean-Pierre Vernant, "The Birth of Images," in *Mortals and Immortals: Collected Essay* (Princeton: Princeton University Press, 1994), 171.

tarik-ulur tersebut telah menegaskan watak paradoksal realitas gambar.<sup>44</sup>

Di era teknologi digital, persoalannya tidak lagi semata-mata terletak pada paradoks dan immaterialitas gambar, melainkan fakta bahwa gambar algoritmik dapat direkayasa dan dibingkai (*framing*) sedemikian rupa melalui teknik editing. Gambar dalam pengertian tradisionalnya mengalami perubahan watak menjadi lebih interaktif, sehingga bukan lagi dapat diandaikan sebatas objek statis yang hanya bisa ditatap subjek, tetapi turut membawa subjek secara aktif masuk luruh di dalamnya. Oleh karena itu, citra yang bersifat interaktif di era media baru (*new media*) merupakan salah satu kondisi yang menyulut dan mempercepat kondisi post-realitas; yaitu, sebagaimana dipaparkan Piliang, kondisi yang di dalamnya prinsip-prinsip realitas itu sendiri telah dilampaui, kemudian diambil alih oleh substitusi-substitusinya yang diciptakan secara artifisial. Realitas yang dibangun oleh pelbagai bentuk distorsi realitas, permainan bebas tanda, penyimpangan hingga kesemuan makna tersebut telah menghancurkan asumsi-asumsi konvensional tentang apa yang sering dipahami sebagai ‘yang nyata.’<sup>45</sup>

Dalam konteks ketika realitas—baik realitas sosial, politik, ekonomi, bahkan keagamaan—memungkinkan untuk dimunculkan melalui representasi sebuah gambar, maka hal yang mendeterminasi sekaligus sangat menentukan hanyalah citra yang di dalamnya terilustrasikan kehendak subjek untuk menguasai, mendominasi, bahkan mengontrol kehidupan sehari-hari di dunia dengan, seringnya, memanipulasi dan membingkai citra dunia melalui teknik editing. Dunia citra menjadi cara subjek mengatur, mengontrol, hingga menguasai

---

<sup>44</sup> Untuk elaborasi lebih lanjut terkait persoalan paradoks ontologi gambar dapat dicermati dalam: Fahmy Farid Purnama dan Jesinta Moza Mustika, “The Nature of Truth in Post-Truth Condition: Criticism about the Rise of Relativism and Its Relation on Popular Islamic Discourse,” *Dirasatuna: Jurnal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2019): 1–34.

<sup>45</sup> Yasraf Amir Piliang, “Post-Teori dan Post-Realitas,” in *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika* (Yogyakarta: Jalasutra, 2015), 3.

realitasnya. Segala sesuatu menjadi sepenuhnya diidentifikasi melalui gambar, sehingga kehilangan sentuhan esensial dengan realitas aktual-objektifnya. Dalam istilah Baudrillard, keterputusan antara realitas dengan representasinya dinamakan dengan kondisi *hyperreal*; yakni kondisi ketika representasi atau gambaran sebuah objek tidak lagi memiliki asal-usul atau merujuk pada realitas objektifnya.<sup>46</sup> Kemudian mengacu pada pemaparan Piliang, hiperrealitas dapat dimaknai sebagai kondisi berbaur dan tumpang-tindihnya pelbagai bentuk tanda dalam ruang representasi. Dengan demikian antara yang semu/asli, palsu/tiruan, lalu/kini, alamiah/artifisial, fakta/fiksi tidak dapat dibedakan lagi, sehingga menciptakan sebuah ruang indeterminasi makna.<sup>47</sup>

Kekaburan batas antara realitas dengan pelampauannya berdampak pada maraknya patologi sosial dan parodi subjektivitas semu yang muncul dalam potret narsisme egologis. Pertanyaannya, bagaimana relasi antara terbentuk antara kondisi hiperrealitas dalam lanskap masyarakat digital dengan tren populisme? Watak kebenaran semacam apa yang diniscayakan relasi tersebut?

### ***Kebenaran Emotif dan Merebaknya Histeria Massa***

Platon cemas, gerakan demokrasi yang tengah berkembang dalam kultur *polis* Yunani kuno dibayangkannya dapat menciptakan suatu kondisi yang memiliki kemungkinan untuk memprioritaskan apa yang populer daripada yang benar. Pada saat tersebut, para elit politik—seolah—dipaksa agar menyerah di hadapan *hoi polloi* (masyarakat kebanyakan); yakni dengan memberi tahu mereka apa yang ingin didengarnya, bahkan saat mereka tidak ingin mendengar kebenaran. Hal tersebut diniscayakan oleh sebab hasrat manusia cenderung hanya ingin mendengarkan apa yang disukainya, meminati hal-hal yang secara emosional membuatnya nyaman, serta mengukuh kebenaran yang sudah dianggap mapan melalui

---

<sup>46</sup> Jean Baudrillard, "Simulacra and Simulacrum," in *Selected Writings*, ed. Mark Poster (Stanford: Stanford University Press, 2002), 166.

<sup>47</sup> Yasraf Amir Piliang, "Post-Teori dan Post-Realitas," 24.

serangkaian proses indoktrinasi. Kondisi psikis seseorang yang terindoktrinasi akan kesulitan untuk menerima penyingkapan-penyingkapan lain yang dapat menciderai normativitas doktrinalnya—walaupun penyingkapan fakta baru tersebut boleh jadi lebih mendekati kenyataan sesungguhnya.

Tentunya kekhawatiran Platon menyeruak dalam konteks politik demokrasi dewasa ini, terlebih dalam lanskap masyarakat kontemporer yang dicirikan sebagai masyarakat digital yang semakin mengukuhkan independensi subjek atas realitas. Dengan sedemikian pesatnya perkembangan *new media* yang hampir seluruh interaksi dan komunikasi kehidupan sosialnya terkoneksi dalam suatu jaringan, maka elemen penting dari persoalan relasi antara populisme dan kebenaran terletak pada konfliknya dengan, serta upaya untuk mengooptasi, narasi berita. Dengan demikian, di antara elemen yang dapat dengan dikaitkan secara proporsional dengan populisme adalah atribut retorikanya; yakni ‘klaim’ untuk mewakili kehendak rakyat dan untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Pertanyaannya, watak kebenaran semacam apa yang muncul dalam suatu retorika populis yang diamplifikasi melalui media tersebut?

Untuk menjawab persoalan tersebut, harus dipahami terlebih dahulu bahwa kesadaran akan adanya perbedaan laten yang inheren dalam realitas sosial telah menggeser cara berfikir masyarakat tradisional yang mengarah pada kondisi, mengacu pada penelitian Zackariasson, ketika nilai-nilai objektivitas dan kebenaran mengalami pergeseran paradigmatis sedemikian rupa. Kesadaran akan adanya perbedaan tersebut mengarah pada kondisi di mana sikap skeptis, relativistik dan sikap acuh tak acuh semakin mendominasi kehidupan intelektual, publik dan sosial. Dalam arti negatif, kondisi tersebut sering diistilahkan dengan sebagai kondisi pasca-kebenaran (*post-truth*).<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ulf Zackariasson, “Introduction: Engaging Relativism and Post-Truth,” in *Relativism and Post-Truth in Contemporary Society: Possibilities and Challenges*, ed. Mikael Stenmark (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018), 1.



Fenomena *post-truth* sendiri mulai mendapatkan perhatian publik pada sekitar November 2016, menyusul fenomena Brexit dan kampanye pemilihan presiden AS yang menyedot perhatian global di tahun tersebut, setelah sebelumnya hanya sebatas wacana-wacana perifer. Laman web Oxford Dictionary sendiri mendefinisikan *post-truth* sebagai ‘kata yang berkaitan dengan atau menunjukkan suatu kondisi ketika fakta objektif kurang—untuk mengatakan tidak sama sekali—berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi.’<sup>49</sup> Dalam pengertian bahwa kebenaran tidak lebih sebatas konstruksi emosi; perasaan, opini, intensi, hingga kepentingan pribadi (*self-referential opinions, interests, and intentions*) terhadap sesuatu terkadang lebih penting daripada fakta sesungguhnya.

Hal ini tidak lantas mengesampingkan atau membelokkan fakta, tetapi keyakinan bahwa fakta selalu dapat diarsir, dipilih, disajikan, dibingkai, bahkan dimanipulasi, menurut satu interpretasi kebenaran di atas tafsiran yang lain. Dalam analisis McComiskey, istilah *post-truth* mengandaikan suatu kondisi di mana bahasa (ungkapan wacana) tidak lagi memiliki referensi apapun terhadap fakta, kebenaran, atau realitas. Konsekuensinya, bahasa, khususnya retorika, menjadi instrumen yang murni bersifat strategis yang tidak merujuk pada apapun selain dirinya sendiri. Kebenaran bergeser dari sesuatu yang bersifat substantif menjadi semata-mata gagasan prosedural.<sup>50</sup> Raibnya acuan fakta yang dirujuk oleh bahasa tersebut banyak diungkapkan dengan istilah *post-fact* atau *false-factum*.

Dalam konteks masyarakat demokratis yang masih didominasi oleh pola pikir populis, kondisi *post-truth* tersebut muncul dalam bentuk maraknya omong kosong, *fake news*, hoaks, hingga *framing* yang riuh menjejali ruang-ruang publik.

---

<sup>49</sup> *Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief.* <https://www.lexico.com/definition/post-truth> diakses pada 10 November 2020

<sup>50</sup> Bruce McComiskey, *Post-Truth Rhetoric and Composition* (Colorado: Utah State University Press, 2017), 6–8.

Realitas tersebut telah mendorong pada suatu kondisi ketika pernyataan atau meme dianggap benar sejauh diinginkan, kemudian dianggap salah sejauh tidak diinginkan, tanpa memperdulikan nilai atau bukti kebenaran sama sekali. Tak ayal, persoalannya terletak bukan pada rasional atau tidaknya sebuah wacana, melainkan emosionalakah publik saat mendengar resoansi narasi populis yang menjejali mereka.

Perubahan radikal pada watak kebenaran yang semata-mata dilandaskan pada emosi dan histeria massa menjadikannya tidak memiliki keterukuran objektif. Kebenaran tidak lagi diukur melalui standar-standar filosofis-ilmiah, tetapi oleh emosi dan keyakinan massa yang silih sahut-menyahut di ruang publik. Jika filsafat bertujuan untuk menemukan kebenaran otentik sebagai konsep dasar dan nilai *par excellence*-nya, maka di hadapan populisme, filsafat terbentur dengan emosi dan histeria massa.

### ***Tantangan Masyarakat Multi-Kultural dan Multi-Religious di Tengah Tren Populisme***

Telah disinggung sebelumnya, dikotomi otentisitas ‘rakyat’ dan inotentisitas ‘elit korup’ dalam konteks populisme tidak didefinisikan dalam kerangka etnis, melainkan moral-etis; yakni tentang ‘melakukan sesuatu yang benar’ bagi semua orang. Klaim kebenaran yang diandaikan menghimpun ‘rakyat’ secara keseluruhan dimungkinkan oleh sebab logika populisme bekerja dengan cara mentotalisasi dan menghomogenisasi segala sesuatu. Namun demikian harus disadari, bahwa klaim inti populisme sendiri merupakan bentuk anti-elitisme dan anti-pluralisme yang dilandaskan pada prinsip-prinsip moral. Maka persoalannya, bagaimana masa depan masyarakat multi-kultural dan multi-religious di hadapan nalar populis yang cenderung mereduksi sejumlah heterogenitas aktual melalui narasi-narasi moralisnya?

Untuk mengelaborasi konsekuensi logika moral dari nalar populis, penelitian ini berpijak pada tiga dari tujuh tesis

terkait populisme yang diketengahkan Müller.<sup>51</sup> Dalam tesis-tesisnya, Müller mengasumsikan bahwa, *pertama*, populisme bukanlah bagian otentik dari politik demokrasi modern ataupun sejenis patologi yang disebabkan oleh irrasionalitas masyarakat, melainkan konsekuensi logis dari sistem politik perwakilan. Selalu tersedia kemungkinan bagi seorang aktor politik untuk berbicara atas nama ‘rakyat’ sebagai cara untuk melawan elit penguasa yang ada.

*Kedua*, walaupun populisme mengandaikan suatu sikap anti-elit, namun tidak lantas yang kritik atas elit penguasa serta-merta menjadi sikap populis. Selain anti-elitis, populisme juga mengandaikan suatu sikap anti-pluralis yang dibingkai dalam bentuk klaim moral—bahkan menjadi poros klaim populisme itu sendiri; yakni klaim bahwa hanya merekalah yang mewakili rakyat, serta-merta siapa pun yang tidak mendukung mereka bukanlah bagian dari rakyat. Maka ketika menjadi oposisi, populis akan dengan sendirinya bersikeras bahwa kalangan elit telah melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral, sedangkan rakyat adalah entitas bermoral dan homogen yang kemauannya bersifat absolut.

*Ketiga*, seringkali populis mengklaim mewakili kepentingan bersama sebagaimana yang dikehendaki rakyat. Tak ayal, alih-alih kehendak tersebut dideduksikan dari representasi simbolis ‘orang-orang nyata’ yang darinya kebijakan yang benar kemudian disimpulkan, hal utama dalam setiap narasi populis justru lebih bersifat strategis-prosedural. Dampaknya, posisi politik seorang populis cenderung kebal terhadap sanggahan empiris. Kaum populis selalu dapat mempolitisasi ‘orang-orang nyata’ atau ‘mayoritas diam.’

Berpijak pada tesis Müller di atas, tampak jelas bahwa geliat nalar populisme hanya mungkin terjadi dalam konteks sistem politik perwakilan; yakni demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai kedaulatan rakyat pada setiap penentuan keputusan menyangkut kehidupan mereka. Orientasi model politik semacam ini, bagaimanapun juga, dapat membuka jalan

---

<sup>51</sup> Jan-Werner Müller, *What is Populism?*, 101–102.

bagi pola pikir populis, baik dalam arti negatif maupun positif, tergantung pada kapasitas kecerdasan rakyat itu sendiri. Dalam arti, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, populisme dapat dimaknai sebagai gerakan progresif yang mengandung watak kritis dan reformis, sekaligus dapat juga dilihat sebagai patologi demokrasi.

Di negara-negara yang religiusitas menjadi fondasi kesadaran masyarakatnya,<sup>52</sup> seperti di Indonesia, hampir sebagian besar, untuk tidak mengklaim semuanya, isu yang sering membangkitkan, bahkan mobilisasi massa, berporos pada isu-isu rasial dan keagamaan, baik level lokal, nasional, maupun global. Isu-isu politik yang dibingkai melalui sejumlah narasi keagamaan dan rasial sering kali menciptakan bentuk kesadaran massa yang tidak terlalu memperhatikan detail, melainkan hanya bergumul dengan isu-isu permukaan; tidak terlalu mencermati nilai-nilai prinsipil, tetapi dilandaskan pada hasrat keterpesonaan, libido dan ekstasi belaka. Alih-alih berpijak pada komitmen religio-eksistensial, agama serta-merta terdangkalkan menjadi kapital dan komoditi politik.

Lain pada itu, dalam konteks masyarakat dengan keragaman agama, ras dan budayanya, watak anti-pluralis pada populisme cenderung bekerja dengan cara mentotalisasi dan menghomogenisasi segala sesuatu, kemudian mereduksi sejumlah heterogenitas aktual yang beroperasi di balik narasi-narasi politik di permukaan. Kemudian melalui klaim moral dan bahasa *Manichean* yang mempertentangkan ‘rakyat’

---

<sup>52</sup> Dalam konteks masyarakat dengan tingkat kesadaran religiusitas sangat tinggi, peristiwa politik pasca-kenabian yang boleh jadi merepresentasikan populisme yang menggunakan narasi keagamaan adalah klaim sekte Khawarij pada peristiwa Arbitrasi (*Tahkim*). Sikap politik populis yang memfungsikan rasio instrumental dalam memahami wacana politik-keagamaan mereka direpresentasikan melalui jargon *la hukma illa Allah* (hukum hanya milik Allah). Jargon tersebut digunakan untuk mengeksklusi kelompok barisan Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah ibn Abi Sufyan yang dianggap telah keluar dari prinsip-prinsip hukum Islam. Selengkapnya lihat: Fahmy Farid Purnama, “Khawarijisme: Pergulatan Politik Sektarian dalam Bingkai Wacana Agama,” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* (2016): 213–232.

melawan ‘elite,’ mesin politik populis sering kali bekerja dengan cara memanipulasi ‘orang-orang nyata’ atau ‘mayoritas diam’ yang bertujuan untuk pemenuhan hasrat politik. Populisme telah mengubah wajah politik menjadi semata-mata strategis-prosedural, bukan lagi ideologis.

### **Kesimpulan**

Ketika lanskap kebudayaan manusia, khususnya di era digital, telah bergeser ke arah budaya pertunjukan, kita dihadapkan pada suatu situasi ketika pelbagai macam hal divisualisasi dan dipertontonkan secara banal dan brutal. Realitas-realitas yang sebelumnya cenderung tertabir di balik moralitas dan etika komunal, serta-merta kehilangan batasnya. Terjadi momen-momen pelampauan pada banyak realitas yang dipertontonkan, dipampangkan, dipamerkan, hingga dipasarkan yang, pada satu sisi, mencerminkan semakin terafirmasi dan terkonfirmasinya semangat kebebasan individu manusia, namun di sisi lain, keterlibatan massa di ruang yang tanpa batas itulah, wajah kebebasan tersebut terdistorsi, bahkan terdeviasi sedemikian rupa, menjadi sedemikian artifisial yang terjebak dalam rimba raya histeria massa. Sementara dalam konteks politik, terlebih sistem politik demokrasi, lanskap kebudayaan tersebut telah mendorong semakin signifikannya keterlibatan logika massa—berikut narasi-narasi penyertanya, di kancah wacana politik-kekuasaan.

Pada realitas yang menyediakan ruang ‘tanpa batas’ bagi keterlibatan massa, budaya populer menemukan momentumnya; yakni sebuah lanskap kebudayaan yang—sering kali—tidak terlalu memperhatikan detail, melainkan hanya bergumul dengan isu-isu permukaan yang mampu membangkitkan emosi massa; tidak terlalu mencermati nilai-nilai prinsipil, tetapi dilandaskan pada hasrat keterpesonaan, libido dan ekstasi belaka. Pada titik inilah, populisme menemukan momentumnya.

Sebagian menganggap populisme sinonim dengan demokrasi karena berporos pada ‘rakyat’; lainnya menganggapnya tidak sama, karena populisme hadir dalam

konteks reformasi demokrasi atau malah jadi mendistorsi konsep demokrasi itu sendiri menjadi semacam ‘populokrasi’ atau ‘mobokrasi.’<sup>53</sup> Terlepas dari itu semua, mengingat logika populis lebih cenderung prosedural, maka nalar populis dan populisme tidak sedang mengajarkan seseorang arti kesetiaan pada nilai, melainkan pada isu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anselmi, Manuel. *Populism: An Introduction*. New York: Routledge, 2018.
- Aslanidis, Paris. “Is Populism an Ideology? A Refutation and a New Perspective.” *Political Studies* 64, no. 1 (2015).
- Baudrillard, Jean. “Simulacra and Simulacrum.” In *Selected Writings*, diedit oleh Mark Poster. Stanford: Stanford University Press, 2002.
- Bonikowski, Bart. “Three Lessons of Contemporary Populism in Europe and the United States.” *Brown Journal of World Affairs* 23, no. 1 (2016): 9–24.
- Brubaker, Rogers. “Populism and Nationalism.” *Nations and Nationalism* 26, no. 1 (2020).
- Canovan, Margaret. “Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy.” In *Democracies and the Populist Challenge*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002.
- Colliot-Thélène, Cathérine. “Populism as a Conceptual Problem.” In *Populism and the Crisis of Democracy: Concepts and Theory*, 2018.
- Freeden, Michael. *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. UK: Cambridge University Press, 2016.
- Hawkins, Kirk A. “The Ideational Approach.” In *Routledge Handbook of Global Populism*. New York: Routledge, 2019.

---

<sup>53</sup> Kedua istilah tersebut belum banyak muncul dalam kajian-kajian akademik secara serius, namun menarik untuk dielaborasi sebagai salah-satu sekian kemungkinan tren politik pasca-demokrasi.

- Hawkins, Kirk A., dan Cristóbal Rovira Kaltwasser. "Introduction: The Ideational Approach." In *The Ideational Approach to Populism. Concept, Theory, and Analysis*, 2019.
- Heidegger, Martin. "The Age of the World Picture." In *The Question Concerning Technology*, diedit oleh William Lovitt. New York: Garland Publishing, 1977.
- Jan-Werner Müller. *What is Populism?* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.
- Laclau, Ernesto. *On Populist Reason*. London: Verso, 2005.
- . "Populism: What's in a Name." In *Populism and the Mirror of Democracy*. London: Verso, 2005.
- Lechte, John. *Genealogy and Ontology of the Western Image and Its Digital Future*. New York: Routledge, 2012.
- McComiskey, Bruce. *Post-Truth Rhetoric and Composition*. Colorado: Utah State University Press, 2017.
- Mény, Yves, dan Yves Surel. "The Constitutive Ambiguity of Populism." In *Democracies and the Populist Challenge*. London: Palgrave Macmillan, 2002.
- Moffitt, Benjamin, dan Simon Tormey. "Rethinking populism: Politics, Mediatisation and Political Style." *Political Studies* (2014).
- Mouffe, Chantal. *For a Left Populism*. London: Verso, 2018.
- Mudde, Cas. "Populism: An Ideational Approach." In *The Oxford Handbook of Populism*. New York: Oxford University Press, 2017.
- . "The Populist Zeitgeist." *Government and Opposition* 39, no. 4 (2004).
- Mudde, Cas, dan Cristóbal Rovira Kaltwasser. *Populism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2017.
- . "Populism and (Liberal) Democracy: A Framework for Analysis." In *Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy?* New York: Cambridge University Press, 2012.
- Ostiguy, Pierre. "Populism: A Socio-Cultural Approach Pierre." In *The Oxford Handbook of Populism*. New York: Oxford University Press, 2017.

- Purnama, Fahmy Farid. "Khawarijisme: Pergulatan Politik Sektarian dalam Bingkai Wacana Agama." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* (2016).
- Purnama, Fahmy Farid, dan Jesinta Moza Mustika. "The Nature of Truth in Post-Truth Condition: Criticism about the Rise of Relativism and Its Relation on Popular Islamic Discourse." *Dirasatuna: Jurnal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2019): 1–34.
- Sartori, Giovanni. "Concept Misformation in Comparative Politics (4)." *American Political Science Review* 64, no. 4 (1970): 1033–1053.
- Skenderovic, Damir. "Populism: A History of the Concept." In *Political Populism*. Germany: Nomos Verlagsgesellschaft, 2017.
- Stanley, Ben. "The Thin Ideology of Populism." *Journal of Political Ideologies* 13, no. 1 (2008).
- Taggart, Paul. *Populism*. Buckingham: Open University Press, 2000.
- Vernant, Jean-Pierre. "The Birth of Images." In *Mortals and Immortals: Collected Essay*. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Weyland, Kurt. "A Political-Strategic Approach." In *The Oxford Handbook on Populism*. New York: Oxford University Press, 2017.
- Yasraf Amir Piliang. "Post-Teori dan Post-Realitas." In *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*. Yogyakarta: Jalasutra, 2015.
- Zackariasson, Ulf. "Introduction: Engaging Relativism and Post-Truth." In *Relativism and Post-Truth in Contemporary Society: Possibilities and Challenges*, diedit oleh Mikael Stenmark. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018.
- <https://www.lexico.com/definition/post-truth> diakses pada 10 November 2020